

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

Fahrurozi¹
Universitas Terbuka¹
fahrurozi24@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk implementasi kebijakan dana desa Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagimon. Jenis penelitian dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan alokasi dana desa yang dilakukan di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi, masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia. Strategi pengelolaan dana desa pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal pelaporan tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Desa secara rutin melaporkan keuangan desa kepada kepala desa setiap bulan tidak sesuai dengan realita dan tidak transparan. Simpulan studi tersebut mengungkapkan bahwa implementasi langkah-langkah perlindungan lingkungan di Dagemon District Obaa Mappi tidak dilakukan dengan baik karena sumber daya yang tidak memadai dan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Faktor utama yang mempengaruhi perlindungan lingkungan di Dagemon adalah kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan.

ABSTRACT

Research is aimed at implementing the policy of funds of the village of Obaa district of Mappi Village Dagimon district. The type of research in the research that will be carried out is qualitative research. The results of the research conducted on the allocation of village funds in Dagemon Village, Obaa Mappi District, have not yet gone well. One factor that affects this is Human Resources. The village fund management strategy in Mappi Village Dagemon district has not gone well, especially in the case of reporting not going well, the village government regularly reports the village's finances to the village head every month is not in line with reality and is not transparent. The conclusion of the study reveals that the implementation of environmental protection measures in Dagemon District Obaa Mappi is not done well due to insufficient resources and inadequate infrastructure construction. The main factor that affects environmental protection in Dagemon is a lack of human resources.

Keywords: Implementation, Management, Policy, Village Funds.

PENDAHULUAN

Keefektifan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengelolaan dana desa. Kabupaten Mappi khususnya Desa Dagemon merupakan salah satu daerah kabupaten yang mendapatkan bantuan dana desa. Besaran dana APBDes jumlah ADD yang diterima oleh kampung Dagemon, Distrik Obaatelah diatur pada Peraturan Bupati Mappi Nomor 11 Tahun 2019 (Indonesia, 2019) tentang pembagian dan penetapan dana desa setiap desa yang ada di Kabupaten Mappi yaitu sebesar Rp.1.599.055.000.

Berdasarkan data Kabupaten Mappi Desa Dagemon memperoleh Dana Desa pada tahun 2020 sebesar 1,792,688,000 kemudian pada tahun berikutnya tahun 2021 APBDes yang diterima menurun yaitu sebesar 1,722,585,000 dan 3 2 pada tahun 2022 APBDes yang diterima mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 1,394,433,000. Pada tahun 2023 APBDes yang diterima mulai mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,538,068,000. Berdasarkan data APBDes penurunan APBDes yang dialami Desa Dagemon, terjadi suatu fenomena yang menyebabkan permasalahan tersebut. Alokasi Dana Desa tersebut berdasarkan fakta yang ada dana yang seharusnya dipergunakan untuk membangun desa tersebut kebanyakan malah disalahgunakan oleh beberapa pegawai yang kurang berkompeten dalam permasalahan alokasi dana sehingga kurang efektif dalam melakukan pengelolaan terhadap dana desa tersebut yang rencananya digunakan untuk mewujudkan, meningkatkan pembangunan desa agar lebih baik kedepannya.

Proses suatu implementasi baru akan dimulai jika tujuan dari sasaran telah ditetapkan, program kegiatan tersusun, dana telah siap dan telah

disalurkan untuk mencapai sebuah sasaran dari yang telah direncanakan (Grindle, 1980). Hasil pengamatan dan informasi dari informan menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Dagemon mempengaruhi alokasi pembangunan dana Desa. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam hal struktur pemerintahan, sumber daya manusia, pelaksanaan program pemberdayaan, dan komunikasi. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi informasi publik mengenai APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes adalah dokumen yang merinci penggunaan dan alokasi dana desa, sehingga penting untuk memastikan ketersediaan informasi publik mengenai hal tersebut” (RM, 51 Th), (SK, 48 Th)”.

Minimnya informasi publik masyarakat pada Dagemon mengenai alokasi pembangunan dana Desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai. Hasil pengamatan dan informasi lapangan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program serta alokasi dana desa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memastikan pelaporan keuangan desa yang konsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau penggunaan dana desa secara transparan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai alokasi pembangunan dana desa juga dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai program-program tersebut” (EB, 58 Th)”.

Kurangnya informasi publik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai ADD dari aparat desa kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mustanir (2016), hasil penelitian membuktikan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa berjalan dengan baik, karena selalu melibatkan masyarakat secara transparan mengenai APBDes dan masyarakat selalu dilibatkan dalam mengawal jalannya pengelolaan anggaran Desa sehingga informasi publik mengenai ADD terbuka dan diketahui masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peran masyarakat dan juga pemerintah sangatlah penting dalam mendampingi jalannya kegiatan bangun desa dengan upaya menempatkan pegawai yang berkompeten padabidangnya dan meningkatkan kedisiplinan kerja pegawainya dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Mappi. Penggunaan dana desa dapat digunakan dalam beberapa kegiatan seperti guna untuk bangun desa, perencanaan ADD, pengelolaan ADD, sampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dimana harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan diharapkan jika penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur, dana tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang mendalam dan mendetail dengan mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa, dan strategi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Teknik Pengumpulan data

pada penelitian ini meliputi: (1) Wawancara, (2) Dokumentasi, (3) Observasi, (4) Studi Pustaka. Analisis data dilakukan mulai masuk lapangan hingga selesai penelitian lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Informan kunci pada penelitian ini terdiri dari 7 orang narasumber yang dijabarkan sebagai berikut: Kepala Kampung, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum Pembangunan, Kaur Kersa, Ketua Bamuskam dan Sekertaris Bamuskam. Informan kunci mendukung teknik wawancara yang dilakukan dan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder dari buku literature dan jurnal penelitian terdahulu.

Proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang membahas tentang implementasi dana desa di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi membuktikan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari prosedur. Minimnya informasi publik masyarakat pada Dagemon mengenai alokasi pembangunan dana Desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai.

Fenomena ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pada jam 14.20 tanggal 05 Oktober 2023 dengan informan Enggel Bertus Miyakaimu, sebagai salah satu kepala Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi terkait fenomena pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan di kampung Dagemon Distrik

Obaa Mappi. “Menurut informan bahwa implementasi dana desa di kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi dilakukan masih sangat jauh dari prosedur. Pelaksanaan implementasi dana desa yang terjadi pada Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi tidak transparan, sehingga informasi yang diterima masyarakat masih sangat minim, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai informasi alokasi pembangunan dana Desa. Selain itu pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan tidak transparan, terutama dalam penggunaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana, dan adanya intervensi pada pelaksanaan PBJ Desa, pelaporan keuangan desa yang tidak di konsolidasi dengan baik.

Penerapan implementasi dana desa sering tidak sesuai dengan isi-isi kebijakan implementasi dana desa yang ada. Pelaksanaan implementasi dana desa Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih dilakukan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan dari dampak pelaksanaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang semestinya dialokasikan terhadap pembangunan namun realitanya digunakan untuk keperluan pribadi. Alokasi dana desa yang seharusnya dilakukan untuk perbaikan jalan sering dikurangi untuk kepentingan pribadi sehingga dalam melaksanakan implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan dengan baik. Alokasi dana bantuan sering dikurangi nominalnya untuk keperluan pribadi, sehingga kemiskinan dan pembangunan Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih terus tergolong tertinggal.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi dana desa pada Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi. Berikut ini adalah hasil observasi yang didapat peneliti terkait dampak dari implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi. Berdasarkan data yang didapat pada Distrik Obaa Kabupaten Mapi Desa Dagimon tahun 2020 klasifikasi desa tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1467 jiwa, 0,0133 penduduk yang miskin. Tahun 2021 klasifikasi desa tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1498 jiwa, 0,0145 penduduk yang miskin. Tahun 2022 klasifikasi desa tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1517 jiwa, 0,0177 penduduk yang miskin. Tahun 2023 klasifikasi desa tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 14527 jiwa, 0,0186 penduduk yang miskin.

Faktor yang menghambat terealisasinya dana desa dengan maksimal salah satunya minimnya informasi publik masyarakat pada Dagemon mengenai alokasi pembangunan dana Desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai. Menurut informasi yang diperoleh dari informan bahwa implementasi dana desa yang dilakukan di kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor permasalahan dilapangan yang menghambat isi kebijakan maupun konteks implementasinya. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan dana desa yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Kampung Dagemon masih kurang kompeten dalam hal mengelola alokasi dana desa. Fenomena ini dapat dilihat

dari tingkat pendidikan yang ada kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi. Tingkat Pendidikan sangat penting dalam mengelola alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Sumber Daya Manusia berpendidikan SD, SMP. Minimnya pengetahuan mengenai Pendidikan terutama dalam mengelola implementasi dana desa berdampak pada salah satu indikator yang merupakan faktor yang menghambat implementasi dana desa berjalan tidak baik. Selain faktor tingkat Pendidikan, faktor yang menghambat implementasi kebijakan dana desa yaitu minimnya kesadaran aparatur desa akan kemajuan dari pembangunan dana desa. Ketidak jujuran aparatur desa dalam mengelolan alokasi dana desa merupakan suatu indikator yang menghambat dampak dari implementasi dana desa. Faktor selanjutnya yaitu aparatur desa kurang berkompeten dalam mengelola dana desa. Faktor selanjutnya yaitu struktur pemerintahan Desa bisa dikatakan belum ideal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan penganggaran terdapat kewenangan yang tumpang tindih antara sekretaris desa dengan kepala dusun.

Berdasarkan observasi faktor yang menghambat implementasi dana desa pada Desa Dagemon dilihat dari data dokumentasi tingkat pendidikan yang mengelola kebijakan dana desa. Rata-rata tingkat pendidikan yang mengelola dana desa hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa pada Dagemon.

Konsep strategi implementasi dana desa yang dilakukan pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon dimana pada strategi tersebut dilakukan mulai dari perencanaan anggaran pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi didapat bahwa strategi dana desa tidak berjalan sesuai konsep yang direncanakan karena tingkat pendidikan pada pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon masih sangat kurang, Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menerapkan strategi tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan implementasi dana desa yang terjadi pada Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi tidak transparan, karena informasi yang diterima masyarakat masih sangat minim, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai informasi alokasi pembangunan dana Desa, dan kurang keterbukaan atau transparan pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan implementasi dana desa pada Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi terutama dalam penggunaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel, penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana, adanya intervensi pada pelaksanaan PBJ Desa, pelaporan keuangan desa yang tidak di konsolidasi dengan baik.

Penerapan implementasi dana desa sering tidak sesuai dengan isi-isi kebijakan implementasi dana desa yang ada. Pelaksanaan implementasi dana desa Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih dilakukan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan dari dampak pelaksanaan tersebut, seperti anggaran yang semestinya dialokasikan terhadap pembangunan namun realitanya digunakan untuk keperluan pribadi. Alokasi dana bantuan sering dikurangi nominalnya untuk keperluan pribadi, sehingga kemiskinan dan pembangunan

Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih terus tergolong tertinggal.

Hal ini dapat dilihat dari data Distrik Obaa Kabupaten Mapi Desa Dagemon tahun 2020 klasifikasi desa tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1467 jiwa, 0,0133 penduduk yang miskin. Tahun 2021 tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1498 jiwa, 0,0145 penduduk yang miskin. Tahun 2022 tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 1517 jiwa, 0,0177 penduduk yang miskin. Tahun 2023 tergolong desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk 14527 jiwa, 0,0186 penduduk yang miskin.

Menurut teori model proses implementasi kebijakan menggunakan teori Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Faktor tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Selain isi implementasi dan konteks implementasi pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon belum dilaksanaksn dengan baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu komunikasi yang kurang antara aparatur desa dengan masyarakat sekitar. Kurangnya komunikasi yang dibangun oleh aparatur desa mengakibatkan minimnya informasi dan kejelasan yang didapatkan oleh masyarakat pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon.

Selain minimnya komunikasi, sumber daya manusia pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon juga merupakan faktor implemenrasi kebijakan dana desa belum berjalan dengan baik. Disposisi pelaksana dalam mengelola kebijakan dana desa pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon juga masih kurang baik, daan struktur birokrasi pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon masih belum berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pada penelitian implementasi dana desa pada Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagemon memiliki korelasi dengan teori pada penelitian Subandi (2018).

Menurut George C. Edwards dalam Subandi (2018), terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang pertama proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Faktor kedua sumber daya manusia. Faktor ketiga yaitu disposisi. Faktor yang keempat yaitu struktur birokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maak dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi, masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari daya serap anggaran yang kurang maksimal dan pembangunan infrastruktur yang masih tergolong tertinggal. Faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang kurang berkompetensi dalam menangani pengelolaan dana desa pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon merupakan faktor yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan dana desa. Strategi pengelolaan dana

desa pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon belum berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan realita dan tidak transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, A., Rivai, A., Wulandari, R. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *CENDRAWASIH. JAMIL: Journal of Administration and Management Politics Literation*. 1(1). 10-18. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/cendrawasih/article/download/154/123/>
- Azizah, A. N., PRabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 9(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p459%20-%20474>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*. 3(2). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey
- Hansiden, P. E. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa (Studi di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara). KNIA 6.0. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi. PResidensi G-20 Indonesia Tahun 2022. Recover Together, Tcover Stronger. 1-4. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/download/803/pdf>
- Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *JE & KP*. 5(1). 1-17. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/391/223/>
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*. 2(1). <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Sekretariat Negara, 2, 1-8.. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019>
- Kapita, M., Mingkid, E., Rares, J. J. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. 1(1). 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/psp/article/view/33776/31991>
- Kartika, K. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. i(2). 1-14. <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/150>

- [8/pdf_368](#)
Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
<https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a6>
- Mustanis, A., Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*. 4(2). 225-238. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749/2593>
- PanuluH, F. (2020). Dana Desa. Proposal. Simlitamas. 8-37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUCN ONQ0hbl
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 46-59. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.353>
- Riadi, S., Sawitri, A., Suasa, S. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal MODERAT*. 6(3). 490-501. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Subandi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Skripsi Thesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD%20SUBANDI-FISIP.pdf>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung